

Strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk memperkuat literasi digital mahasiswa

*Nur Cholifah¹, Nila Sari², Ade Ricky Rozzaqi³, Siswanto⁴

^{1,4}Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FIP Universitas PGRI Semarang

²Prodi PPKn, FKIP Universitas Sriwijaya

³Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, FMIPA FISIP Universitas PGRI Semarang

Corresponding Author: *Nur Cholifah

E-mail: cholifah@upgris.ac.id

Abstract

The increasingly intensive use of social media among university students has reshaped the ways they obtain information, engage in discussion, and form views within the public sphere. This development has positioned digital literacy as an important concern for higher education institutions. Previous studies have largely described students' levels of digital competence through surveys, while limited attention has been given to how such capacities are developed through learning experiences, particularly within the context of Civic Education. This study aims to examine learning strategies in Civic Education for strengthening students' digital literacy. A qualitative approach with a case study design was employed at a private university in Semarang. The study involved two lecturers and ten students over one academic semester. Data were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis, and were analysed thematically through repeated coding and interpretation. The findings indicate that students became more engaged when course materials were connected to issues closely related to their everyday digital experiences. Discussions concerning misinformation, data privacy, and online ethics made classroom interaction more dynamic and encouraged the habit of verifying information sources before using them as references. Within the same process, students became more careful in expressing their views and more open to differing perspectives. These findings suggest that Civic Education should not be confined to the transmission of normative values, but can extend its function as a pedagogical space for fostering critical, ethical, and responsible digital citizenship. Accordingly, curriculum development needs to provide clearer space for information verification, digital ethics, and healthy public participation.

Article History

Received: 27 April 2026

Accepted: 04 June 2026

Published: 12 June 2026

Keywords:

Learning strategy, civic education, digital literacy

PENDAHULUAN

Perubahan digital dalam beberapa tahun terakhir berlangsung dengan intensitas yang tinggi dan memengaruhi hampir seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Proses memperoleh informasi, kegiatan belajar, pola komunikasi, hingga pembentukan pandangan sosial kini semakin banyak berlangsung melalui ruang digital. Media sosial berkembang menjadi salah satu arena interaksi yang paling aktif, terutama di kalangan generasi muda. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa penetrasi internet nasional telah melampaui 79 persen penduduk, sedangkan kelompok usia 18–24 tahun termasuk kategori pengguna paling aktif (APJII, 2024; Nurhanisah, 2024). Rentang usia tersebut beririsan langsung dengan populasi mahasiswa di perguruan tinggi. Kondisi ini menempatkan kampus pada situasi baru, yaitu berhadapan dengan generasi yang sangat akrab dengan teknologi, namun belum seluruhnya memiliki kesiapan dalam menyikapi kompleksitas informasi digital. Hoaks, manipulasi opini, ujaran merendahkan, serta arus informasi yang bergerak cepat kerap diterima tanpa proses penilaian yang memadai. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kecakapan teknis menggunakan perangkat belum cukup tanpa kemampuan berpikir kritis, kematangan bernalar, dan tanggung jawab etis dalam ruang digital (Georgopoulou et al., 2025; Livingstone, 2004).

Literasi digital saat ini menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam pendidikan tinggi. Maknanya jauh melampaui kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, karena mencakup kecakapan menelusuri informasi secara tepat, menilai keandalan sumber, mengolah data secara bertanggung jawab, menyampaikan gagasan secara efektif, serta menjaga etika dalam interaksi digital. Eshet-Alkalai (Eshet-Alkalai, 2004) menjelaskan bahwa literasi digital dibangun oleh dimensi teknis, kognitif, dan sosial yang saling berkaitan. Kerangka tersebut tetap relevan, sementara perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa literasi digital juga mencakup kemampuan mengevaluasi informasi daring, menjaga keamanan data pribadi, memahami jejak digital, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam ruang virtual. (Georgopoulou et al., 2025) menegaskan bahwa kompetensi digital mahasiswa berkaitan erat dengan kemampuan menilai praktik informasi daring secara kritis serta menggunakan media digital secara cerdas dalam lingkungan akademik. Berbagai temuan pada pendidikan tinggi juga menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung cepat mengakses informasi, tetapi belum selalu cermat dalam memeriksa kualitas sumber yang digunakan. Penggunaan referensi yang lemah validitasnya, kutipan tanpa penelusuran memadai, serta kecenderungan memilih jawaban instan masih kerap dijumpai dalam proses belajar. Keadaan tersebut menandakan bahwa penguatan literasi digital tidak dapat diserahkan pada kebiasaan individual semata, melainkan perlu dibangun melalui pembelajaran yang terarah, konsisten, dan bernilai akademik tinggi.

Mahasiswa merupakan generasi terdidik yang akan memasuki berbagai bidang profesi dan mengambil bagian dalam kehidupan publik. Cara mereka memahami informasi, menyikapi perbedaan pendapat, serta membentuk pertimbangan pada masa sekarang akan turut memengaruhi kualitas kehidupan sosial pada masa mendatang. Hobbs (Hobbs, 2010) menegaskan bahwa literasi media berkaitan erat dengan kemampuan warga negara menilai pesan secara kritis serta bertindak secara sadar. UNESCO (N. Law et al., 2018) menempatkan literasi digital sebagai salah satu fondasi penting bagi masyarakat yang inklusif dan adaptif. Perguruan tinggi berperan menyiapkan lulusan yang unggul secara akademik sekaligus membentuk warga yang mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan menunjukkan tanggung jawab dalam interaksi digital. Peran tersebut semakin penting ketika ruang publik sering dipenuhi respons yang serba cepat dalam dunia digital.

Perkembangan media sosial menghadirkan tantangan baru bagi pendidikan kewarganegaraan, terutama dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi arus informasi yang cepat, beragam, dan tidak selalu terverifikasi. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan menilai kredibilitas sumber, menyampaikan pendapat secara rasional, menghargai perbedaan, serta menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab. Literasi media dipandang sebagai kompetensi penting untuk membangun keterlibatan warga negara dalam demokrasi partisipatoris (Mihailidis & Thevenin, 2013). Paparan informasi politik melalui internet juga dapat mendorong partisipasi publik apabila disertai kapasitas evaluatif yang memadai (Kim et al., 2013). Interaksi digital yang sehat selanjutnya berpotensi memperkuat hubungan warga dengan institusi publik dan memperluas ruang partisipasi sosial (Mossberger et al., 2013). Pendidikan kewarganegaraan karena itu perlu diarahkan pada pembentukan mahasiswa yang kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis kontemporer. Nilai kewargaan menumbuhkan sikap menghargai orang lain, kemampuan mengendalikan diri, serta tanggung jawab dalam interaksi digital. Pendidikan Kewarganegaraan karena itu perlu dipahami sebagai ruang belajar yang dekat dengan pengalaman mahasiswa, bukan sekadar penyampaian norma secara formal. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang relevan dengan kehidupan digital berperan dalam memperkuat literasi, etika, dan kesiapan berpartisipasi di ruang publik (Japar et al., 2024). Dimensi digital dalam pendidikan kewargaan juga terbukti memengaruhi kualitas keterlibatan warga muda dalam demokrasi kontemporer (Bowyer & Kahne, 2020). Media sosial pada saat yang sama dapat menjadi sarana partisipasi sipil apabila disertai tanggung jawab dan kesadaran kritis (Mulyono et al., 2022). Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dengan demikian perlu diarahkan pada pembentukan mahasiswa yang reflektif, partisipatif, dan beretika dalam masyarakat digital.

Pada sejumlah konteks, perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan masih bertumpu pada penyampaian materi, hafalan konsep, dan evaluasi yang berfokus pada capaian kognitif. Pola pembelajaran tersebut semakin sulit menjawab persoalan digital mahasiswa yang terus berubah dari waktu ke waktu. Isu seperti hoaks, jejak digital, privasi data, keamanan siber, etika bermedia sosial, dan budaya diskusi daring belum secara konsisten hadir sebagai bagian utama pembelajaran. Akibatnya, nilai-nilai kewargaan sering berhenti pada tataran konseptual dan belum terhubung secara kuat dengan pengalaman digital mahasiswa sehari-hari. Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna ketika nilai-nilai kewargaan dipertemukan dengan persoalan nyata yang mereka hadapi dalam ruang digital (Tarsidi et al., 2023).

Kajian literasi digital di pendidikan tinggi umumnya berfokus pada kompetensi digital mahasiswa, praktik penggunaan informasi digital, dan kewargaan digital dalam lingkungan pembelajaran (Georgopoulou et al., 2025; Japar et al., 2024). Meskipun telah memberikan gambaran mengenai kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi dengan teknologi dan informasi digital, kajian tersebut belum banyak menjelaskan bagaimana kemampuan tersebut berkembang melalui pengalaman pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, perhatian terhadap aspek ini menjadi penting karena nilai-nilai berpikir kritis, tanggung jawab, penghargaan terhadap perbedaan, dan partisipasi yang beretika memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan digital. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan pada strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kontribusinya terhadap penguatan literasi digital mahasiswa.

Fokus penelitian ini adalah strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk memperkuat literasi digital mahasiswa di era media sosial. Fokus pembahasan diarahkan pada praktik pembelajaran yang digunakan dosen, pengalaman belajar mahasiswa, serta dinamika yang muncul selama proses perkuliahan berlangsung. Pendekatan tersebut

diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana literasi digital tumbuh melalui pengalaman belajar yang terancang, bukan semata-mata tercermin dalam angka pengukuran. Hasil kajian diharapkan memperkaya pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang peka terhadap perubahan zaman sekaligus menyediakan rujukan praktis bagi perguruan tinggi dalam merancang pembelajaran yang kontekstual. Relevansi tersebut berkaitan dengan kebutuhan menghadirkan warga negara digital yang kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat kontemporer (O'Toole et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Yin, 2018) untuk mengkaji bagaimana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berhubungan dengan penguatan literasi digital mahasiswa pada era media sosial. Pilihan ini digunakan karena persoalan yang ditelaah menyangkut pengalaman belajar, interaksi kelas, dan kebiasaan bermedia digital yang lebih tepat dipahami melalui penelusuran mendalam daripada pengukuran numerik semata. Penelitian berlangsung di satu perguruan tinggi swasta di Semarang selama semester September sampai Desember 2025. Kampus tersebut dipilih karena telah menerapkan pembelajaran berbasis digital dan menampung mahasiswa dari beragam program studi, sehingga menyediakan lingkungan yang relevan untuk membaca dinamika literasi digital di ruang akademik. Partisipan dipilih melalui purposive sampling dan terdiri atas dua dosen pengampu serta sepuluh mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah tersebut. Jumlah partisipan ditetapkan berdasarkan kecukupan informasi dan keberagaman pengalaman. Pemilihan informan mempertimbangkan pengalaman mengajar, keaktifan akademik, intensitas penggunaan media sosial, serta variasi pengalaman belajar digital. Seluruh partisipan memberikan persetujuan setelah menerima penjelasan mengenai tujuan penelitian. Identitas personal disamarkan untuk menjaga kerahasiaan, sedangkan keikutsertaan berlangsung atas dasar kesediaan tanpa paksaan. Peneliti tidak terlibat dalam penilaian akademik mata kuliah sehingga hubungan dengan partisipan tetap berada dalam batas profesional. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kecakapan digital mahasiswa berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, pengelolaan informasi, serta evaluasi sumber di tengah padatnya arus konten daring (Ng, 2012; Siddiq et al., 2017).

Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan telaah dokumen pembelajaran berupa RPS, bahan ajar, tugas mahasiswa, serta aktivitas pada learning management system. Rekrutmen partisipan dihentikan ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan tema substantif baru, sehingga kejenuhan makna dinilai tercapai (Hennink et al., 2017). Analisis data menggunakan reflexive thematic analysis mengikuti Braun dan Clarke karena pendekatan ini menyediakan langkah kerja yang sistematis sekaligus peka terhadap makna yang muncul dari pengalaman partisipan (Braun & Clarke, 2006, 2021). Proses analisis meliputi pembacaan berulang, pengodean induktif pada level semantik, pengembangan tema awal, peninjauan konsistensi tema, dan penulisan narasi interpretatif. Keandalan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, member checking, memo reflektif, serta audit trail yang mendokumentasikan keputusan metodologis selama penelitian berlangsung (Birt et al., 2016; Lincoln & Guba, 1985; Paulus et al., 2017). Susunan prosedur tersebut digunakan untuk menunjukkan bagaimana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berhubungan dengan tumbuhnya mahasiswa yang kritis, etis, dan bertanggung jawab sebagai warga digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses teknologi belum menjamin literasi digital mahasiswa

Selama proses observasi, mahasiswa tampak memanfaatkan berbagai platform digital sebagai bagian dari aktivitas belajar sehari-hari. Media sosial digunakan untuk mengikuti perkembangan informasi, aplikasi percakapan untuk koordinasi akademik, dan mesin pencari sebagai rujukan awal dalam menemukan sumber belajar.

Kedekatan dengan teknologi itu belum selalu diikuti kecermatan dalam memilih informasi. Mahasiswa M1 mengungkapkan, “*Saya biasanya ambil yang paling cepat muncul. Setelah dibahas di kelas, baru sadar belum tentu sumber terbaik.*” Mahasiswa M2 menyampaikan, “*Kalau berita sedang ramai, dulu saya mudah percaya.*” Mahasiswa M11 menambahkan, “*Saya tahu penting cek sumber, tetapi kalau terburu-buru kadang tetap langsung pakai.*” Dosen D1 menjelaskan bahwa mahasiswa umumnya cepat menyesuaikan diri dengan aplikasi baru, namun tidak semuanya terbiasa memeriksa siapa penulis informasi tersebut, dari mana asalnya, dan apakah isinya layak dipercaya. Penelaahan terhadap tugas awal semester juga masih menemukan rujukan dari laman umum yang tidak mencantumkan identitas penulis secara jelas serta tidak memiliki dasar akademik yang memadai.

Kedekatan mahasiswa dengan teknologi digital belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan mengevaluasi informasi secara kritis. Dalam praktik pembelajaran, pemilihan sumber informasi sering didasarkan pada kemudahan dan kecepatan akses, sementara aspek akurasi, validitas, dan kredibilitas sumber belum selalu menjadi pertimbangan utama. Temuan ini memberi catatan penting bagi pendidikan tinggi. Banyak penelitian sebelumnya memotret literasi digital melalui survei tingkat kemampuan atau persepsi mahasiswa. Pendekatan tersebut berguna untuk melihat gambaran umum, tetapi belum selalu menjelaskan bagaimana kesenjangan antara penggunaan teknologi dan kecakapan evaluatif muncul dalam praktik belajar sehari-hari. Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat tampak mahir secara operasional, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam membaca konteks, memeriksa kredibilitas, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab.

Livingstone (2004) membedakan kemampuan mengakses media dengan kemampuan memahami serta mengevaluasi pesan secara kritis. Eshet-Alkalai (Eshet-Alkalai, 2004) menempatkan literasi digital sebagai perpaduan kemampuan teknis, kognitif, dan sosial. Pengalaman lapangan pada studi ini mengarah pada penjelasan yang sama. Mahasiswa telah akrab dengan ruang digital, namun kualitas literasi digital memerlukan proses pembelajaran yang sengaja dirancang. Kehadiran teknologi di kampus, dengan demikian, belum cukup tanpa pembiasaan berpikir kritis, disiplin akademik, dan tanggung jawab dalam penggunaan informasi.

Pembelajaran kontekstual meningkatkan relevansi Pendidikan Kewarganegaraan

Suasana kelas mulai berubah ketika materi Pendidikan Kewarganegaraan dihubungkan dengan persoalan yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Isu penyalahgunaan data pribadi, hoaks, polarisasi opini di media sosial, dan etika berkomunikasi di ruang digital menghadirkan respons yang berbeda dibanding pertemuan yang hanya berisi penjelasan konsep. Pada pengalaman sebelumnya, sebagian mahasiswa memandang mata kuliah ini penting secara formal, tetapi terasa terlalu teoritis dan cukup jauh dari keseharian mereka. Ada pula yang mengaitkannya dengan hafalan normatif. Setelah konteks pembelajaran disesuaikan, kelas terasa lebih bergerak. Mahasiswa yang biasanya diam mulai ikut berbicara. Beberapa yang jarang bertanya justru tampak aktif memberi tanggapan.

Mahasiswa M3 menyatakan, “*Kalau contoh kasusnya nyata, saya lebih mudah memahami materi.*” Mahasiswa M4 menuturkan, “*Saya baru sadar ternyata PKn dekat dengan kehidupan online kami.*” Pernyataan tersebut memberi gambaran bahwa mahasiswa lebih mudah menangkap makna pembelajaran ketika topik yang dibahas bersentuhan langsung dengan pengalaman yang mereka jalani. Materi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang jauh. Mahasiswa dapat melihat kaitan antara isi kuliah dan persoalan yang benar-benar mereka hadapi.

Di sisi lain, respons mahasiswa tetap beragam. Beberapa mahasiswa aktif menyampaikan pandangan, sementara sebagian lain masih memilih mengikuti arus diskusi dan mendengar lebih dulu sebelum berbicara. Tidak semua mahasiswa langsung nyaman berbicara. Mahasiswa M12 memberi catatan bahwa diskusi kadang melebar ketika isu yang dibahas terlalu ramai dan memancing emosi. Relevansi materi dengan isu digital yang sedang berkembang mendorong keterlibatan mahasiswa secara lebih aktif, namun sekaligus menuntut pengelolaan diskusi yang cermat agar pembahasan tetap terarah pada tujuan pembelajaran.

Catatan observasi minggu keempat memperlihatkan jumlah mahasiswa yang menyampaikan tanggapan meningkat dari dua orang pada pertemuan awal menjadi tujuh orang ketika topik dikaitkan dengan isu digital yang sedang ramai dibicarakan. Pada beberapa saat, kelas justru terasa lebih hidup ketika dosen memberi ruang jeda sebelum menanggapi. Jeda singkat tersebut memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyusun pendapat dan memberanikan diri berbicara. Dosen D2 mengakui bahwa memilih isu aktual memang membantu keterlibatan mahasiswa, tetapi juga menuntut kesiapan lebih besar agar diskusi tetap terarah dan bernilai akademik.

Gambaran lapangan tersebut memperlihatkan kecenderungan bahwa konteks yang relevan merupakan pintu masuk penting bagi keterlibatan belajar, meskipun tetap memerlukan pengelolaan pedagogis yang cermat. Materi yang dekat dengan realitas mahasiswa membuka ruang partisipasi. Arah diskusi tetap perlu dijaga agar tidak berubah menjadi respons sesaat. Bond (Bond et al., 2021) menekankan pentingnya desain pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan lingkungan belajar. Prince (Prince, 2004) juga menjelaskan bahwa pembelajaran aktif mendorong keterlibatan mahasiswa secara lebih kuat dibanding model satu arah. Dalam konteks penelitian ini, relevansi pedagogis lahir dari pertemuan antara materi kewarganegaraan dan pengalaman hidup mahasiswa.

Berbeda dari banyak studi sebelumnya yang cenderung menilai efektivitas pembelajaran melalui survei kepuasan atau persepsi mahasiswa, data lapangan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa keterlibatan belajar sering tumbuh ketika mahasiswa melihat hubungan langsung antara materi kuliah dan kehidupan digital mereka. Nilai-nilai kewarganegaraan menjadi lebih mudah dipahami ketika diterjemahkan ke dalam pengalaman konkret, bukan hanya disampaikan sebagai konsep abstrak. Mata kuliah yang kerap dianggap normatif ternyata dapat menjadi ruang pembelajaran yang relevan ketika dihubungkan dengan pengalaman hidup mahasiswa.

Diskusi kritis menumbuhkan kebiasaan verifikasi informasi

Perubahan perilaku mahasiswa cukup sering terlihat ketika dosen menggunakan diskusi berbasis isu aktual. Mahasiswa diminta membawa berita yang sedang viral, menelusuri sumber asalnya, membandingkan dengan media lain, lalu menjelaskan alasan mengapa informasi tersebut layak dipercaya atau justru perlu diragukan. Cara ini membuat mahasiswa tidak berhenti pada kebiasaan menerima informasi begitu saja. Mereka mulai belajar memeriksa. Kelas pun menjadi ruang latihan yang terasa nyata.

Mahasiswa M5 menyampaikan, “*Sekarang kalau presentasi saya cek sumber dulu, karena teman-teman pasti bertanya asal datanya.*” Mahasiswa M6 menambahkan, “*Saya baru sadar berita*

yang dibagikan banyak orang belum tentu benar.” Pernyataan tersebut memberi gambaran bahwa diskusi kelas menghadirkan tekanan akademik yang sehat. Mahasiswa terdorong menyiapkan bahan dengan lebih hati-hati karena sumber informasi dapat dipertanyakan secara terbuka. Verifikasi akhirnya tidak sekadar anjuran dosen, tetapi mulai menjadi bagian dari kebiasaan belajar.

Respons mahasiswa tetap beragam. Mahasiswa M13 mengakui, *“Kalau tugas mepet, kadang saya masih tergoda mengambil sumber yang paling cepat ditemukan.”* Mahasiswa M10 juga menyampaikan bahwa ia sering memilih diam ketika diskusi berlangsung cepat karena merasa kurang siap membaca bahan sebelumnya. Tidak semua mahasiswa nyaman dengan proses verifikasi; sebagian menganggap langkah tersebut memakan waktu, terutama ketika tenggat tugas cukup dekat. Ada mahasiswa yang kritis di kelas, tetapi masih longgar saat mengerjakan tugas cepat. Tidak semua mahasiswa berubah cepat. Seiring dengan proses pembelajaran yang berlangsung, mahasiswa tidak lagi bergantung pada satu sumber informasi, tetapi mulai membandingkan berbagai rujukan dan mempertimbangkan kredibilitasnya sebagai dasar penyusunan argumentasi.

Telaah tugas mingguan menunjukkan adanya pergeseran penggunaan referensi dari blog populer menuju media resmi, situs lembaga, dan artikel ilmiah. Sebagian mahasiswa berkembang cukup pesat, sementara sebagian lain masih memerlukan pendampingan agar lebih teliti membaca sumber. Hobbs (Hobbs, 2010) menempatkan kemampuan menganalisis dan mengevaluasi pesan sebagai inti literasi media. Vraga dan Tully (Vraga & Tully, 2021) juga menunjukkan bahwa pendidikan literasi berita berkaitan dengan meningkatnya sikap kritis terhadap informasi di media sosial.

Konteks penelitian ini memperlihatkan bahwa kebiasaan memeriksa informasi tumbuh ketika verifikasi diposisikan sebagai kebutuhan akademik, bukan sekadar imbauan moral. Kelas berfungsi sebagai ruang belajar yang melatih tanggung jawab intelektual dalam praktik sehari-hari.

Etika komunikasi digital tumbuh melalui pengalaman bersama

Pada salah satu diskusi awal semester, beberapa mahasiswa masih merespons perbedaan pendapat dengan nada yang cukup tajam. Sanggahan lebih diarahkan kepada individu daripada isi argumen. Nada bicara kadang lebih menonjol dibanding alasan yang disampaikan. Situasi seperti ini tidak muncul di setiap pertemuan, tetapi cukup memberi gambaran tentang pola komunikasi yang masih berkembang. Seiring berjalannya perkuliahan, kecenderungan tersebut mulai berubah. Mahasiswa menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan komentar dan lebih fokus pada substansi pembahasan. Mahasiswa M7 menyampaikan, *“Sekarang saya berpikir dua kali sebelum berkomentar keras, karena jejak digital bisa tetap ada.”* Mahasiswa M8 menuturkan, *“Saya belajar untuk tidak setuju tanpa merendahkan orang lain”*. Pernyataan tersebut memberi gambaran bahwa mahasiswa mulai menyadari hubungan antara cara berkomunikasi dan dampak sosial yang ditimbulkan. Perbedaan pendapat tidak lagi selalu dipahami sebagai pertentangan pribadi. Sebagian mulai melihatnya sebagai bagian wajar dari diskusi akademik.

Mahasiswa M14 mengakui bahwa pada isu tertentu ia masih mudah terbawa emosi, tetapi mulai berusaha menahan diri. Sebagian masih terbawa emosi. Tidak semua perubahan terjadi cepat. Perubahan perilaku memang tidak selalu berjalan lurus. Pada beberapa diskusi, mahasiswa mulai meminta klarifikasi sebelum menyanggah pendapat teman. Ada yang memilih bertanya lebih dulu daripada langsung menyela. Kondisi tersebut mencerminkan berkembangnya kemampuan mahasiswa dalam mengelola perbedaan pendapat secara lebih konstruktif, sehingga diskusi tidak lagi berpusat pada individu, melainkan pada pertukaran gagasan dan argumentasi.

Catatan observasi forum pertengahan semester memperlihatkan bahwa mahasiswa lebih sering menggunakan alasan, data, dan rujukan ketika menyampaikan sanggahan. Nada respons juga cenderung lebih terkendali. Perubahan tidak selalu sama di setiap ruang interaksi. Beberapa mahasiswa sudah lebih tenang di kelas, tetapi masih reaktif di grup percakapan daring ketika topik yang dibahas menyentuh isu sensitif. Kontradiksi ini wajar dan menunjukkan bahwa pembentukan etika digital membutuhkan waktu.

Pengamatan selama penelitian menunjukkan bahwa etika komunikasi lebih mudah tumbuh ketika mahasiswa berhadapan langsung dengan akibat sosial dari cara mereka menyampaikan pendapat. Ucapan yang terlalu tajam sering membuat suasana diskusi menegang dan peserta lain memilih menahan diri. Sebaliknya, tanggapan yang disampaikan dengan tenang biasanya menjaga percakapan tetap berjalan dan membuka kemungkinan saling memahami. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pembelajaran kewargaan di era digital tidak cukup jika hanya berhenti pada penjelasan norma, tetapi perlu dihubungkan dengan pengalaman komunikasi yang benar-benar mereka alami.

Ng (2012) menjelaskan bahwa literasi digital mencakup dimensi teknis, kognitif, dan sosial-emosional, termasuk kemampuan menilai informasi serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Siddiq (Siddiq et al., 2017) menambahkan bahwa kecakapan digital juga mencakup kemampuan mengelola informasi dan memanfaatkan perangkat secara efektif sebagai bagian dari kompetensi abad ke-21. Choi (Choi et al., 2017) menempatkan etika, tanggung jawab, dan partisipasi sebagai inti kewargaan digital. Temuan ini memperlihatkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tetap penting, terutama untuk membantu mahasiswa berdialog secara dewasa, menghargai perbedaan, dan memahami dampak sosial dari setiap tindakan komunikasi di ruang digital. Ruang kelas dalam penelitian ini berfungsi sebagai laboratorium sosial tempat mahasiswa belajar berdialog secara sehat. Mahasiswa tidak hanya mempelajari nilai kewarganegaraan sebagai konsep, tetapi juga berlatih menjalankannya dalam interaksi sehari-hari.

Perubahan mahasiswa berlangung beragam dan tidak linear

Respons mahasiswa terhadap strategi pembelajaran menunjukkan variasi yang cukup jelas. Sebagian mahasiswa berkembang relatif cepat dan mulai aktif berdiskusi, sedangkan sebagian lain masih merasa nyaman dengan jawaban singkat, ringkasan instan, atau memilih diam ketika isu publik dibahas. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kebiasaan belajar sebelumnya, rasa percaya diri, serta kemampuan membaca sumber yang lebih kompleks. Latar belakang mahasiswa tidak sama. Cara mereka beradaptasi juga berbeda.

Mahasiswa M9 mengungkapkan, *“Kalau artikelnya panjang, saya sering mencari ringkasannya dulu.”* Mahasiswa M10 menyampaikan, *“Saya kadang diam karena merasa teman lain lebih paham.”* Mahasiswa M15 menambahkan, *“Saya suka diskusi, tetapi kalau harus membaca banyak referensi masih kewalahan.”* Pernyataan tersebut memberi gambaran bahwa hambatan mahasiswa tidak selalu terletak pada minat belajar, tetapi sering berada pada kesiapan akademik dan kepercayaan diri untuk terlibat.

Perbedaan cara mahasiswa berpartisipasi mencerminkan beragamnya kesiapan akademik, kebiasaan belajar, dan kemampuan mengolah informasi. Oleh karena itu, keterlibatan dalam pembelajaran perlu dipahami secara lebih luas daripada sekadar keaktifan berbicara selama diskusi. Kontras seperti ini menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa tidak dapat diukur hanya dari siapa yang paling sering berbicara selama diskusi. Sebagian masih bertahan pada cara lama. Tidak semua siap berubah. Dosen D1 menilai bahwa sebagian mahasiswa memerlukan pendampingan bertahap karena belum terbiasa membaca bahan yang mendalam. Pengamatan kelas juga memperlihatkan bahwa mahasiswa yang pada

awal semester cenderung pasif mulai berani bertanya setelah beberapa kali diberi ruang diskusi dalam kelompok kecil. Perubahan kecil seperti ini penting, meskipun sering luput dari perhatian jika penilaian hanya berfokus pada partisipasi terbuka di kelas besar.

Gambaran lapangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan belajar sering berlangsung bertahap dan tidak selalu tampak dalam partisipasi kelas. Strategi yang efektif bagi satu kelompok belum tentu memberi dampak serupa pada kelompok lain. OECD (OECD, 2021) menekankan bahwa pengembangan kompetensi pembelajar memerlukan pendekatan yang responsif terhadap keragaman kebutuhan dan kesiapan peserta didik. Konteks penelitian ini memperlihatkan bahwa perguruan tinggi perlu menyiapkan strategi yang bertahap, suportif, dan adaptif agar penguatan literasi digital dapat menjangkau mahasiswa dengan latar kemampuan yang beragam.

Sintesis temuan, kebaruan, dan implikasi kebijakan

Secara keseluruhan, data lapangan memperlihatkan bahwa literasi digital mahasiswa berkembang melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu paparan teknologi, pengujian kritis, dan internalisasi etis. Paparan teknologi memberi akses dan kemudahan, tetapi belum cukup membentuk kompetensi yang lebih matang. Pengujian kritis mulai tumbuh ketika mahasiswa dilatih memeriksa sumber, menyusun argumen, dan mempertanggungjawabkan pendapat. Internalisasi etis tampak ketika mahasiswa mulai menahan komentar impulsif, lebih sering meminta sumber rujukan, dan menyadari bahwa jejak digital dapat membawa konsekuensi sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan literasi digital mahasiswa berkembang melalui proses pembelajaran yang berangkat dari persoalan digital yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, kemudian diolah melalui diskusi kritis, verifikasi informasi, dan refleksi terhadap praktik bermedia. Proses tersebut berkontribusi pada terbentuknya mahasiswa yang lebih kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Sintesis hubungan antartemuan tersebut disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Proses Penguatan Literasi Digital melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan



Sumber: olahan peneliti

Proses tersebut tidak muncul secara seragam pada seluruh mahasiswa. Sebagian berkembang cukup cepat, sementara sebagian lain masih memerlukan pendampingan dan waktu belajar yang lebih panjang. Dari sini tampak bahwa penguatan literasi digital bukan hasil dari satu pertemuan atau satu metode tunggal, melainkan proses bertahap yang berlangsung melalui pengalaman belajar yang berulang. Penguatan literasi digital mahasiswa berlangsung melalui proses pembelajaran yang menempatkan isu-isu digital sebagai bagian dari pengalaman belajar yang perlu dipahami, dikaji, dan direfleksikan secara kritis. Keterlibatan mahasiswa dalam diskusi, verifikasi informasi, serta refleksi terhadap praktik bermedia menunjukkan bahwa literasi digital berkembang tidak hanya melalui interaksi dengan teknologi, tetapi juga melalui proses pedagogis yang membentuk kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab etis. Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai ruang pembelajaran yang menghubungkan nilai-nilai kewargaan dengan realitas kehidupan digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa literasi digital dapat dipahami tidak hanya sebagai seperangkat kompetensi, tetapi juga sebagai hasil dari proses pembelajaran yang berkontribusi pada pembentukan kewargaan digital mahasiswa.

Konteks Indonesia memiliki arti penting karena mahasiswa hidup dalam masyarakat yang sangat aktif menggunakan media sosial, beragam secara sosial-budaya, serta menghadapi arus informasi publik yang bergerak cepat. Situasi tersebut menuntut pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang cakap secara akademik, tetapi juga warga digital yang mampu menjaga nalar publik dan etika bermedia.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tetap relevan dalam merespons kebutuhan kewargaan digital di perguruan tinggi ketika pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Diskusi daring di kelas memperlihatkan bahwa kemampuan menyampaikan perbedaan pendapat secara wajar, memeriksa informasi sebelum bereaksi, dan mempertimbangkan dampak ucapan terhadap orang lain tidak tumbuh melalui penjelasan konsep semata. Seorang mahasiswa menyatakan, “Saya belajar tidak setuju tanpa harus menjatuhkan orang lain.” Mahasiswa lain menambahkan, “Saya jadi lebih hati-hati sebelum ikut menyebarkan informasi.” Dua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan lebih mudah muncul ketika mahasiswa berhadapan langsung dengan persoalan komunikasi yang mereka alami sendiri. Meski demikian, tidak semua mahasiswa bergerak pada kecepatan yang sama; sebagian masih memerlukan pendampingan dan latihan berulang.

Temuan ini memberi isyarat bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu bergeser dari pola pengajaran yang bertumpu pada hafalan norma menuju pembelajaran yang menggunakan pengalaman digital sebagai bahan refleksi bersama. Literatur sebelumnya menjelaskan bahwa literasi digital mencakup kemampuan teknis, kognitif, dan sosial dalam menggunakan teknologi, mengelola informasi, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab (Ng, 2012; Siddiq et al., 2017). Choi (Choi et al., 2017) menunjukkan bahwa etika, partisipasi, dan tanggung jawab merupakan unsur pokok kewargaan digital. Literasi digital di pendidikan tinggi selama ini lebih banyak dibahas dalam kaitannya dengan kompetensi penggunaan teknologi, pengelolaan informasi, dan kewargaan digital. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan literasi digital juga berkaitan dengan proses pembelajaran yang menghubungkan nilai-nilai kewargaan dengan pengalaman mahasiswa dalam ruang digital.

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pengetahuan kewargaan, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, menghargai perbedaan pandangan, dan menggunakan media digital secara bertanggung

jawab. Temuan tersebut memperkaya kajian literasi digital dengan menempatkan pengalaman belajar sebagai bagian penting dalam pembentukan kewargaan digital mahasiswa. Meskipun penelitian ini dilakukan pada satu perguruan tinggi dan perlu dipahami sesuai konteks institusinya, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etika digital, verifikasi informasi, dan dialog publik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpotensi mendukung penguatan warga digital yang kritis dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Data penelitian ini memperlihatkan bahwa kedekatan mahasiswa dengan teknologi belum cukup untuk melahirkan literasi digital yang matang. Kemudahan mengakses informasi, keluwesan menggunakan media sosial, serta intensitas berada di ruang digital memang memberi keuntungan praktis dalam kehidupan akademik. Keadaan tersebut belum selalu diikuti kemampuan memeriksa keandalan sumber, menimbang isi informasi secara kritis, maupun memahami dampak etis dari komunikasi daring. Literasi digital, dengan demikian, lebih tepat dipahami sebagai kapasitas yang dibentuk melalui proses belajar yang terus berlangsung, bukan sekadar akibat dari seringnya penggunaan teknologi. Temuan ini memberi isyarat bahwa pendekatan yang terlalu menekankan penyediaan perangkat dan akses internet saja belum memadai apabila tidak disertai pembentukan nalar kritis dan tanggung jawab penggunaan media.

Data lapangan menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki relevansi baru ketika pembelajaran dipertemukan dengan persoalan yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Isu hoaks, privasi data, polarisasi opini, jejak digital, dan etika bermedia sosial membuat ruang kelas terasa lebih hidup serta mendorong keterlibatan yang lebih nyata. Mahasiswa mulai terdorong membandingkan sumber, menguji argumen, dan lebih hati-hati saat menyampaikan pendapat. Perubahan tersebut tidak bergerak dengan kecepatan yang sama; sebagian mahasiswa berkembang lebih cepat, sebagian lain memerlukan waktu dan pendampingan yang lebih panjang. Kondisi ini menegaskan bahwa literasi digital tumbuh melalui pengalaman belajar yang konsisten, bukan melalui ceramah sesaat. Studi ini menunjukkan bahwa penguatan literasi digital lebih efektif berkembang melalui pedagogi kewargaan yang dialogis daripada melalui paparan teknologi semata.

Nilai penting dari studi ini terletak pada penegasan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi tepat dipandang semata sebagai mata kuliah normatif, melainkan sebagai ruang pedagogis untuk menumbuhkan warga digital yang kritis, etis, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi secara dewasa di ruang publik. Pada titik ini, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dibaca sebagai jembatan konseptual antara civic education dan digital citizenship dalam konteks pendidikan tinggi. Posisi tersebut memberi kontribusi baru karena literasi digital tidak lagi ditempatkan hanya sebagai keterampilan teknis, melainkan sebagai praktik kewargaan yang menuntut penalaran, etika, dan tanggung jawab sosial. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu memberi ruang yang lebih jelas bagi verifikasi informasi, etika digital, dan partisipasi publik daring agar teknologi tidak berhenti sebagai fasilitas, tetapi berubah menjadi sarana pembentukan karakter intelektual. Temuan ini lahir dari konteks satu perguruan tinggi, sehingga pembacaan pada lingkungan lain tetap memerlukan kehati-hatian. Kajian berikutnya dapat membandingkan konteks kampus negeri, swasta, dan lintas wilayah guna melihat bagaimana variasi budaya akademik memengaruhi pembentukan literasi digital mahasiswa. Arah yang tampak cukup jelas ialah bahwa masa depan pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih perangkat yang dimiliki kampus, tetapi oleh seberapa serius kampus membentuk cara berpikir dan cara bertindak mahasiswanya dalam ekosistem digital kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2024). Hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia. In *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*.
- Birt, L., Scott, S., Cavers, D., Campbell, C., & Walter, F. (2016). Member checking: A tool to enhance trustworthiness or merely a nod to validation? *Qualitative Health Research*, 26(13), 1802–1811. <https://doi.org/10.1177/10497323166654870>
- Bond, M., Bedenlier, S., Marín, V. I., & Händel, M. (2021). Emergency remote teaching in higher education: mapping the first global online semester. In *International Journal of Educational Technology in Higher Education* (Vol. 18, Number 1). <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00282-x>
- Bowyer, B., & Kahne, J. (2020). The digital dimensions of civic education: Assessing the effects of learning opportunities. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 69. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2020.101162>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE. <https://www.torrossa.com/it/resources/an/5282292>
- Choi, M., Glassman, M., & Cristol, D. (2017). What it means to be a citizen in the internet age: Development of a reliable and valid digital citizenship scale. *Computers and Education*, 107. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.002>
- Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital era. In *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*.
- Georgopoulou, M. S., Troussas, C., Krouska, A., & Sgouropoulou, C. (2025). Digital Literacy in Higher Education: Examining University Students' Competence in Online Information Practices. *Computers*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/computers14120528>
- Hennink, M. M., Kaiser, B. N., & Marconi, V. C. (2017). Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough? In *Qualitative Health Research* (Vol. 27, Number 4). <https://doi.org/10.1177/1049732316665344>
- Hobbs, R. (2010). Digital and Media Literacy: A Plan of Action written by. *Communications*.
- Japar, M., Casmana, A. R., Adha, M. M., & Fadhillah, D. N. (2024). Students' Perspectives on Civic Education through Digital Citizenship in The Virtual Era. *European Journal of Educational Research*, 13(1). <https://doi.org/10.12973/eu-jer.13.1.89>
- Kim, Y., Chen, H. T., & Gil De Zúñiga, H. (2013). Stumbling upon news on the Internet: Effects of incidental news exposure and relative entertainment use on political engagement. *Computers in Human Behavior*, 29(6). <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.06.005>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications. [https://doi.org/10.1016/0147-1767\(85\)90062-8](https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8)
- Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. *Communication Review*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/10714420490280152>
- Mihailidis, P., & Thevenin, B. (2013). Media Literacy as a Core Competency for Engaged Citizenship in Participatory Democracy. *American Behavioral Scientist*, 57(11). <https://doi.org/10.1177/0002764213489015>
- Mossberger, K., Wu, Y., & Crawford, J. (2013). Connecting citizens and local governments? Social media and interactivity in major U.S. cities. *Government Information Quarterly*, 30(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.016>
- Mulyono, B., Affandi, I., Suryadi, K., & Darmawan, C. (2022). Online civic engagement: Fostering citizen engagement through social media. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1). <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.49723>
- N. Law, Woo, D. J., & Wong, G. (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. *UNESCO Institute for Statistics*, (51).
- Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? *Computers and Education*, 59(3). <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.016>
- Nurhanisah, Y. (2024). 221 Juta Penduduk Indonesia Makin Melek sama Internet. *Indonesia Baik*.

- OECD. (2021). 21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World. In *OECD Publishing*.
- O'Toole, J. M., Lee, J. K., & Altamimi, T. (2024). Digital Citizenship, Values and Cultural Dynamism. *International Journal of Research in STEM Education*, 6(1). <https://doi.org/10.33830/ijrse.v6i1.1687>
- Paulus, T. M., Jackson, K., & Davidson, J. (2017). Digital tools for qualitative research: Disruptions and entanglements. In *Qualitative Inquiry* (Vol. 23, Number 10). <https://doi.org/10.1177/1077800417731080>
- Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. In *Journal of Engineering Education* (Vol. 93, Number 3). <https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x>
- Redecker, C. (2017). European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu. In *Joint Research Centre (JRC) Science for Policy report*. <https://doi.org/10.2760/159770>
- Siddiq, F., Gochyyev, P., & Wilson, M. (2017). Learning in Digital Networks – ICT literacy: A novel assessment of students' 21st century skills. *Computers and Education*, 109. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.014>
- Tarsidi, D. Z., Suryadi, K., Budimansyah, D., & Rahmat, R. (2023). Social media usage and civic engagement among Indonesian digital natives: An Analysis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.60812>
- Vraga, E. K., & Tully, M. (2021). News literacy, social media behaviors, and skepticism toward information on social media. *Information Communication and Society*, 24(2). <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1637445>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book250150>
- ..